

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang memiliki periode lama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan output, mendistribusikan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kesuksesan pembangunan ekonomi bukan sekedar suatu hal yang dapat dihitung dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun termasuk juga daya suatu wilayah dalam mewujudkan lapangan pekerjaan yang memadai dan bernilai tinggi. Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara aspek pembangunan ekonomi serta ketenagakerjaan yang saling mempengaruhi dalam upaya meraih pembangunan yang bersifat inklusif serta berorientasi jangka panjang.

Pengangguran adalah salah satu persoalan inti dan umumnya biasa berlangsung selama dilakukannya usaha pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya penyediaan kesempatan kerja yang optimal dapat memunculkan ketidakseimbangan antara banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan terhadap keberadaan peluang mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak sekedar dapat diperhitungkan dari peningkatan output saja, melainkan juga harus mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sukirno (2006:13) mengemukakan bahwa faktor terjadinya pengangguran adalah tidak berhasilnya individu dalam kelompok

angkatan kerja serta memiliki kemauan dalam melakukan pekerjaan untuk meraih pekerjaan yang diimpikan.

Dalam sudut pandang islam, pengangguran memang dipandang sebagai permasalahan multidimensi yang melampaui aspek ekonomi semata, permasalahan pengangguran mencakup dimensi moral, sosial, dan spritual secara komprehensif. Perspektif ekonomi islam menempatkan kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi kekayaan sebagai prioritas dengan menekankan prinsip tanggung jawab kolektif (takaful) agar setiap orang dalam masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang bermartabat sesuai kapasitasnya (Sari et al., 2024).

Islam sangat mendorong setiap individu untuk terlibat aktif dalam kegiatan produktif dan mencari penghidupan melalui bekerja. Bahkan hal ini bukan sekedar anjuran melainkan ditetapkan sebagai kewajiban bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Pemahaman ini berasal dari pandangan bahwa bekerja dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, namun juga bagian dari ibadah serta pelaksanaan tugas individu yang merupakan insan di alam ini. QS. Al-Jumuah [62]:10 menerangkan bahwa masing-masing insan mempunyai tugas untuk bekerja dengan aktif serta mengupayakan diri agar terlepas dari sikap malas (Amar dkk, 2024)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Pada QS. Ar-Rahman [55]: 33 berikut terkandung amanat yang menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan mencapai kesempatan

kerja dibutuhkan peningkatan keterampilan, pendidikan, dan tindakan konkret, bukan sekedar berharap akan datangnya kesempatan.

يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۚ ۳۳

“Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah).”

Ayat tersebut menyiratkan pemahaman mengenai ujian Allah kepada makhluk-Nya untuk melewati batasan melalui kekuatan ilmu pengetahuan. Kata "sulthaan" pada ayat tersebut dijelaskan oleh para pakar interpretasi kitab suci sebagai kekuatan bersumber dari wawasan, otoritas, atau kemampuan yang dimiliki manusia (Nurcholis & Rudisunhaji, 2020: 20). Ayat ini secara tidak langsung mengarahkan manusia agar senantiasa memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai persiapan dalam menjalani kehidupan.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan kenaikan kesejahteraan masyarakat sebagai manfaat dari pembentukan ketersediaan lapangan kerja secara terus menerus. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterkaitan peningkatan perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja tidak selamanya memiliki pengaruh yang positif. Di Provinsi Kalimantan Selatan, fenomena peningkatan perekonomian dan ketenagakerjaan antar kabupaten/kota memperlihatkan dinamika yang sangat beragam, hal ini berpengaruh terhadap keadaan pengangguran terbuka yang sampai sekarang terus menjadi persoalan utama di tingkat daerah.

BPS mencatat bahwa pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 2,13 juta orang, dengan jumlah pengangguran sebanyak 88.000 orang atau setara TPT dengan angka 4,20%. Meskipun angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,31 %, secara absolut jumlah penganggur tetap signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kelompok kerjadi terjadi dengan cepat dibanding laju pertumbuhan kapasitas penyediaan kesempatan kerja, sehingga kesempatan kerja tersedia tidak bisa menyerap semua pencari kerja. Hal ini menyebabkan dominasi tenaga kerja yang harus mengambil pekerjaan di luar sektor formal yang memiliki perolehan penghasilan minim serta perlindungan sosial yang terbatas (BPS Kalsel, 2024)

Terdapat kesenjangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat daerah dengan tingkat pengangguran relatif rendah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencatat TPT sekitar 2,12%, sementara di daerah lain terdapat TPT yang lebih tinggi.

Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja antar wilayah. Kabupaten/kota dengan TPT rendah umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih mampu menyerap tenaga kerja, seperti dominasi sektor pertanian atau usaha informal yang relatif fleksibel. Sebaliknya, daerah dengan TPT lebih tinggi biasanya merupakan wilayah perkotaan atau daerah dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, namun belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Hal ini juga dapat terjadi di karenakan *Mismatch* keterampilan ketika kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sektor formal. Hal ini sering terjadi pada pekerja dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, terutama yang memerlukan kompetensi teknis. Penyebabnya meliputi kurangnya informasi pasar kerja, perencanaan pendidikan yang tidak berbasis industri, serta minimnya pelatihan vokasi yang terarah.

Tabel 1.1 Persentase Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	3,57	3,52	4,17	3,58	3,43
Kotabaru	4,96	5,57	6,7	6,08	6,05
Banjar	3,87	3,98	2,72	2,73	2,71
Barito Kuala	2,93	3,22	3,63	3,42	3,41
Tapin	3,73	4,96	4,15	3,93	3,86
Hulu Sungai Selatan	2,24	2,44	2,29	2,12	2,11
Hulu Sungai Tengah	3,9	3,76	3,35	3,26	3,2
Hulu Sungai Utara	4,49	4,8	4,64	3,85	3,73
Tabalong	3,07	3,43	4,46	3,6	3,44
Tanah Bumbu	6,95	6,83	6,89	6,56	6,37
Balangan	2,46	2,44	3,98	2,7	2,69
Kota Banjarmasin	8,32	8,47	6,96	6,7	6,56
Kota Banjarbaru	5,54	5,7	5,47	5,01	4,93
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2020-2024 (Data diolah)

Dari informasi di atas, diketahui beberapa Kabupaten/Kota mempunyai angka pengangguran terbuka pada tingkat yang cukup tinggi. Fenomena tersebut merupakan akibat dari ketidaksetaraan lapangan kerja dengan kebutuhan masyarakat, serta ketidakcocokan keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan

Selatan terdapat 4 kabupaten/kota yang nilainya melampaui rata-rata provinsi yakni Kota Banjarmasin tertinggi dengan 6,56%, disusul Kab. Tanah Bumbu (6,37%), Kab. Kotabaru (6,05%), dan Kota Banjarbaru (4,93%)

Sebagai pusat perekonomian, Kota Banjarmasin mempunyai tingkat pengangguran yang cenderung tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini dikarenakan banyak pencari kerja dari daerah lain, akibatnya persaingan pada pasar kerja semakin tinggi dan tidak seluruh pencari kerja dapat tertampung dalam pasar kerja yang tersedia

Selain itu Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua setelah Kota Banjarmasin. Meskipun Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sumber daya batu bara, lapangan kerja di sektor tambang terbatas dan biasanya didominasi oleh kehadiran tenaga kerja dari luar daerah mengakibatkan peluang kerja bagi masyarakat lokal menjadi terbatas.

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penilaian pembangunan dari dimensi kesejahteraan edukasi, kesejahteraan fisik dan mental, dan standar kelayakan kehidupan. Indeks ini turut mencerminkan produktivitas kerja penduduk, sehingga pengembangan kemampuan dan keahlian sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran (Nashih et al., 2024).

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	69,38	69,87	70,35	70,98	71,43
Kotabaru	68,86	69,13	69,74	70,18	70,61

Banjar	69,18	69,89	70,72	71,46	71,87
Barito Kuala	66,22	66,64	67,37	68,11	68,84
Tapin	70,11	70,31	71,02	72	72,51
Hulu Sungai Selatan	68,85	69,21	69,76	70,5	71,21
Hulu Sungai Tengah	68,84	69,05	69,7	70,13	70,69
Hulu Sungai Utara	65,59	66,12	66,84	67,66	68,28
Tabalong	72,19	72,6	73,13	73,85	74,41
Tanah Bumbu	70,71	71	71,79	72,31	72,95
Balangan	68,82	69,11	69,73	70,49	71,34
Kota Banjarmasin	77,1	77,57	77,97	78,5	79,05
Kota Banjarbaru	79,1	79,26	79,68	80,11	80,51
Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84	72,50	73,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2020-2024 (Data diolah)

Data diatas menunjukkan adanya kesenjangan Indeks Pembangunan manusia, dengan Banjarbaru serta Banjarmasin menempati posisi pertama dan kedua sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Kalimantan Selatan, jauh di atas rata-rata provinsi. Sementara kabupaten lainnya berada pada tingkat IPM yang lebih rendah. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari status Banjarmasin dan Banjarbaru sebagai kota, sedangkan wilayah lainnya merupakan kabupaten. Kota dan kabupaten mempunyai perbedaan yang mencolok, yaitu kelengkapan fasilitas pada bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap di kota menciptakan kesempatan kenaikan keberhasilan pembangunan manusia yang berada pada wilayah tersebut. Perbedaan penting lainnya juga terletak pada besar cakupan wilayah. Kabupaten di Kalimantan Selatan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibanding dengan kota, sehingga menjadikan cakupan kontrol di kabupaten lebih jauh dan berat.

Kesuksesan peningkatan kualitas manusia dilihat dari kapabilitas dalam menyelesaikan hambatan-hambatan mendasar masyarakat. Aspek yang mampu

merubah perbaikan kapasitas SDM terdiri dari permasalahan yang berkaitan dengan putus sekolah, Tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran, dan kondisi ekonomi. Maka dari itu, pemerintah berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pembangunan manusia sebagai faktor penting dalam usaha peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota.

PDRB merupakan faktor berikutnya yang mampu merubah tingkat pengangguran. Aspek ini mengindikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang mengacu terhadap *value* terakhir dari produk yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Peningkatan pertumbuhan wilayah sebuah kota dapat dilihat dari bagaimana daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor (Rusdiyah, Maulina & Dahliana, 2016:164). PDRB mempunyai hubungan berdampak besar terhadap banyaknya tenaga kerja mampu terpenuhi oleh pasar kerja. Peningkatan nilai PDRB mendorong pertumbuhan nilai tambah output di berbagai sektor ekonomi, dan pada akhirnya akan berengaruh terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja yang menjadi faktor positif pada perluasan kesempatan kerja serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja yang tersedia. (Mahroji & Anwar, 2020:49).

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	-3,83	2,05	3,86	3,57	3,85
Kota Baru	2,41	1,85	3,08	2,84	3,92
Banjar	1,26	1,65	2,79	2,71	3,16
Barito Kuala	-1,63	1,68	2,03	2,55	3,53
Tapin	-1,25	2,04	3,55	3,57	3,63

Hulu Sungai Selatan	1,72	3	2,74	4,01	3,92
Hulu Sungai Tengah	2,86	2,01	2,87	3,08	3,96
Hulu Sungai Utara	2,71	1,96	2,84	3,32	3,28
Tabalong	-2,58	1,75	3,82	3,48	3,5
Tanah Bumbu	14,05	2,43	3,77	3,24	3,28
Balangan	-2,29	1,63	3,61	2,61	2,64
Kota Banjarmasin	4,95	2,77	5,24	5,22	5,27
Kota Banjar Baru	1,45	1,17	5,73	4,67	4,61
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2020-2023 (Data diolah)

Tabel di atas memperlihatkan PDRB di Kalimantan Selatan menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten dan kota, mencerminkan perbedaan potensi ekonomi dan struktur sektor unggulan pada setiap daerah. Wilayah kota seperti Banjarmasin mempunyai nilai PDRB yang lebih baik akibat dari aktivitas ekonomi yang terpusat seperti sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan yang relatif maju. Akan tetapi, wilayah kabupaten mencakup dari Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong mempunyai PDRB yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah meski nilainya relatif lebih rendah dibanding kota-kota besar.

Faktor selanjutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Faktor ini menunjukkan rasio total *labor force* dan total Masyarakat dengan umur kerja berbentuk persen. Peningkatan TPAK yang berbanding lurus dengan peningkatan banyaknya penduduk yang memiliki pekerjaan merupakan kondisi yang ideal. Namun, apabila terjadi peningkatan TPAK tanpa adanya peningkatan penerimaan tenaga kerja, artinya terjadi ketidakseimbangan pada pasar kerja. Minimnya peluang kerja mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran karena kesempatan

kerja tersedia tidak mampu menampung laju pertumbuhan populasi kerja (Salsabila et al., 2024:105).

Tabel 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	72,03	72,27	70,92	69,61	73,03
Kota Baru	64,68	67,5	63,96	64	65,8
Banjjar	72,55	70,84	69,91	70,21	71,03
Barito Kuala	74,61	75,48	70,74	71,89	73,46
Tapin	70,17	70,31	70,31	70,17	68,12
Hulu Sungai Selatan	73,15	69,25	69,55	74,91	75,77
Hulu Sungai Tengah	71,15	70,2	67,63	71,97	74,53
Hulu Sungai Utara	70,08	71,41	69,35	75,34	73,89
Tabalong	69,27	71,49	72,32	72,94	74,17
Tanah Bumbu	70,16	68,29	64,75	68,57	67,35
Balangan	76,5	75,38	72,54	73,16	76,91
Kota Banjarmasin	62,07	63,19	63,15	66,16	63,93
Kota Banjarbaru	66,82	65,95	62,46	67,18	67,23
Kalimantan Selatan	69,33	69,26	67,55	69,76	70,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2020-2023 (Data diolah)

Angka TPAK PADA wilayah Kalimantan Selatan cukup tinggi, sekitar 69,55%–70,22% pada Februari dan Agustus 2024, dengan tenaga kerja yang didominasi ditampung pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun, ketersediaan lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan, terutama karena sekitar 53–55% tenaga kerja bekerja di sektor informal yang penghasilannya kurang stabil. Kota-kota seperti Banjarbaru dan Banjarmasin menghadapi pengangguran terbuka relatif tinggi karena persaingan kerja dari pendatang dan keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor industri. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesempatan kerja formal untuk menyerap seluruh angkatan kerja.

Keadaan yang dicita-citakan pada pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan tingkat pengangguran yang rendah serta tingkat keikutsertaan angkatan kerja yang meningkat agar dapat terserap oleh pekerjaan yang berkualitas beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, realita menunjukkan walaupun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung lebih tinggi, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada pada jumlah yang tinggi, mencerminkan masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Keadaan ini mencerminkan ketimpangan antara total peluang memperoleh pekerjaan terhadap kenaikan populasi kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan empiris tentang pengaruh faktor IPM, faktor pertumbuhan ekonomi atau PDRB, serta faktor TPAK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Silvie dan Hasmarini (2023) menemukan bahwa IPM dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang berbanding terbalik secara signifikan terhadap TPT, sedangkan TPAK memiliki pengaruh yang berbanding lurus secara signifikan. Berbeda dengan temuan tersebut, Wulandari dan Syafri (2023) serta Kartika dan Muslim (2021) menjelaskan peningkatan perekonomian dapat merubah TPT dengan bermakna, akan tetapi memberikan hasil yang berbeda terhadap pengaruh TPAK. Anggraini dkk. (2023) menemukan peningkatan perekonomian dapat merubah dengan hasil yang berbanding terbalik, tetapi tanpa ada pengaruh berarti IPM bagi TPT, sedangkan Salsabila dkk. (2024) menunjukkan bahwa TPAK terhadap TPT tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian dari aspek signifikansi serta arah pengaruh variabel, mengindikasikan bahwa keterkaitan antara pembangunan manusia, peningkatan perekonomian, keikutsertaan populasi bekerja, dan jumlah masyarakat tidak bekerja hingga kini masi tidak dapat ditarik Kesimpulan dengan pasti. Ketidakstabilan hasil menunjukkan adanya perbedaan karakteristik wilayah, struktur ekonomi, serta dinamika pasar tenaga kerja.

Berdasarkan fenomena di atas, meskipun Kalimantan Selatan mencatat angka partisipasi kerja yang tinggi, permasalahan ketenagakerjaan dan ketidakseimbangan peningkatan perekonomian dengan kemampuan menampung populasi bekerja masih nyata. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji pengaruh IPM, PDRB, serta TPAK pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan selama tahun 2020 hingga 2024. Melalui metode analisis data panel terhadap 13 kabupaten/kota.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dapat dirumuskan pada kajian ini terdiri dari:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020-2024?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara parsial terhadap

tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah diidentifikasi, adapun tujuan yang akan dipenuhi pada kajian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji hipotesis IPM, PDRB, TPAK memiliki pengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan pada periode 2020-2024.
2. Untuk menguji hipotesis IPM, PDRB, TPAK memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan pada periode 2020-2024.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil kajian yang akan dilaksanakan, penulis mengharapkan hasil yang dapat menjadi manfaat untuk semua pihak yang terlibat yang meliputi.

1. Bagi Peneliti

Kajian yang dilakukan diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan bagi penulis tentang keterkaitan antara teori dan kondisi nyata yang ditemukan dalam penelitian tentang IPM, PDRB, TPAK kepada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan selama tahun 2020-2024.

2. Bagi Pembaca

Hasil kajian yang dilakukan harapannya bisa menjadi sumber yang berguna, khususnya bagi mata kuliah ekonomi makro, dan ekonometrika, terutama dalam hal penerapan analisis regresi data panel.

3. Bagi Pengambil Keputusan

Hasil kajian ini harapannya bisa menjadi data yang dapat digunakan untuk memahami aspek yang bisa merubah tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan agar para pemangku kepentingan bisa mengetahui penyebab yang perlu dikaji agar dapat menyelesaikan isu mengenai pengangguran

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil kajian ini harapannya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan sumber relevan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan mengungkap variabel yang berhubungan dengan tingkat pengangguran terbuka.